

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PTPN V
(STUDI KASUS DESA PANTAI RAJA KECAMATAN
PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Progam Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Dr. Made Davi W. MSi

SITI MARWAH
NPM : 187110417

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Siti Marwah
NPM : 187110417
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi
Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar

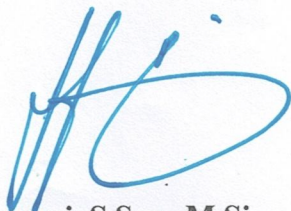
Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk uji dalam sidang Konferensi

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Turut Menyetujui,

Progam Administrasi Publik,
Ketua

Dosen Pembimbing,



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Marwah
NPM : 187110417
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN
V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan
Perhentian Raja Kabupaten Kampar

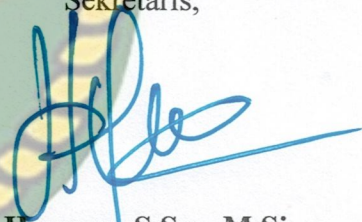
Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif. Telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua

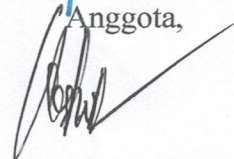
Pekanbaru, Agustus 2022
Sekretaris,



Dr. Made Devi Wedayanti, S.Ap, M.Si

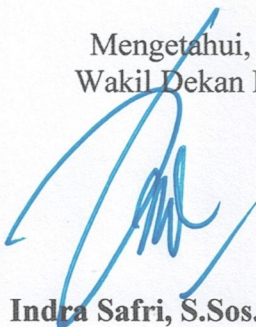


Herman, S.Sos, M.Si
Anggota,



Kartius, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M,Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Marwah
NPM : 187110417
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN
V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan
Perhentian Raja Kabupaten Kampar

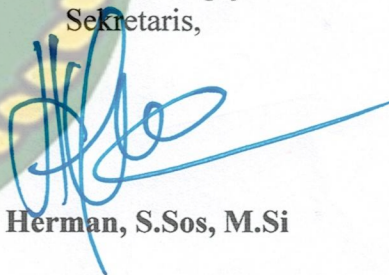
Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan Administrasi dan Akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Ketua

Pekanbaru, Agustus 2022
An. Tim Penguji
Sekretaris,



Dr. Made Devi Wedayanti, S.Ap, M.Si

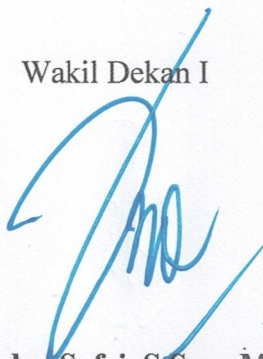


Herman, S.Sos, M.Si

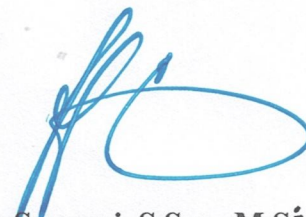
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Ketua Prodi Administrasi Publik



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



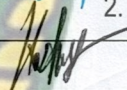

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0715/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 03 Agustus 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 04 Agustus 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Siti Marwah
NPM : 187110417
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar)

Nilai Ujian : Angka : " 84 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si.	Ketua	1. 
2.	Herman, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Kartius, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 04 Agustus 2022
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0715/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Marwah
N P M : 187110417
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar)

Struktur Tim :

1. Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Herman, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Kartius, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si. Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022

Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK-080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi

Yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit

Tanda bukti dan ucapan terima kasih ku kepada

Segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang

Telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku

Sampai saat ini.

Khusus untuk Ayahanda

Bersama Ibunda yang tercinta. Terima

Kasih atas seluruh limpahkan kasih sayang yang tidak

Berbatas yang telah beliau curahkan kepada ku,

Semoga Allah Swt tetap melimpahkan Rahmat dan

Karunia yang tiada terputus kepada Beliau, Amin

Kepada yang tersayang Adik-adik

Yang telah membantu

Ku baik materil maupun moril serta memotivasi ku

Dalam menyelesaikan studi. Terima kasih atas semua

Bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt.

Mencatatnya sebagai amal beliau dan

Membalasinya dengan rahmat dan karunia yang

Setimpal, Amin



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil`alamin, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-NYA serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar)”** Kemudian sholawat dan salam saya haturkan untuk junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Solli a`ala sayyidina Muhammad wa`ala ali sayyidina Muhammad Assalamualaika Ya Rasullulah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai berkahnya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Dalam proses studi maupun dalam proses penulisan penyelesaian Skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut memberikan semangat, dukungannya dan membantu penulis. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembar ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.CL, karena penulis kuliah di Universitas Islam Riau ini, telah menyediakan Fasilitas-fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman dan selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si selaku ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik yang selalu turut memberikan Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP, M.Si, selaku Pembimbing saya

- yang memberikan motivasi penulis dalam penulisan penyusunan Skripsi ini dan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan fikirannya sehingga penulis bisa menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik, memberikan arahan, dan memberikan dorongan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini dengan baik.
 6. Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam segala urusan Adminitrasi.
 7. Bapak dan Ibu serta Pimpinan PTPN V Wilayah Kabupaten Kampar beserta Rekan-rekan yang telah memberikan informasi kepada peneliti dalam penulisan dan Penyusunan Skripsi ini.
 8. Terkhusus Ayahanda tercinta Hartono, S.Pd, M.Si dan Ibunda tercinta Murniati yang selalu mendoakan dan tidak pernah lelah memberikan arahan dan motivasi penulis untuk menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini.
 9. Kepada Abang Rizki sepriyadi yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini.
 10. Kepada Sahabat-sahabatku Fatimah Azzahra, Winda Febriana, Mislira Hati dan Sri Wahyuni Sapitri yang telah memberikan semangat serta dukungan material maupun non material dalam Penyusunan Skripsi ini.
 11. Kepada Teman-teman seperjuangan semua Mahasiswa Administrasi Publik kelas B angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada saya dalam Penyusunan Skripsi ini.

Naskah Skripsi Penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif

diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk membantu Skripsi Adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi pembaca.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2022

Penulis

Siti Marwah



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	v
SK TIM PENGUJI UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Administrasi.....	14
2. Administrasi Publik.....	16
3. Organisasi	18
4. Organisasi Publik.....	19
5. Manajemen	20
6. Manajemen Publik.....	22
7. Kebijakan Publik	23
8. Pelaksanaan	27
9. Pembangunan Berkelanjutan	30
10. CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	31
11. Efektivitas	37
B. Kerangka Pikir.....	40
C. Konsep Operasional	42
D. Operasional Variabel.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46

A. Tipe Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i>	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	50
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	50
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	52
B. Pemerintah Kabupaten Kampar.....	56
C. PTPN V Nusantara	64
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	69
A. Identitas Responden.....	69
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	69
C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar)	83
BAB VI PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Rencana CSR PT. Perkebunan Nusantara V dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kampar tahun 2020-2021	8
Tabel I.II	Aliran Dana CSR PTPN V Wilayah Kabupaten Kampar dalam Infrastruktur Pembangunan Musholla Al-Munawarah	9
Tabel II.1	Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	41
Tabel III.1	Key informan dan Informan Penelitian	45
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikiran Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	37
---	----



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Marwah
NPM : 187110417
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan Administrasi, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 07 Juni 2022

Penulis,



Siti Marwah

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PTPN V
(STUDI KASUS DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN
RAJA KABUPATEN KAMPAR**

Siti Marwah

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.13 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program *corporate social responsibility* Perusahaan PTPN V Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, untuk mengetahui faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori Pelaksanaan dengan indikator yang ditetapkan yakni : Standar kebijaksanaan dan tujuan, Sumber Daya, Karakteristik agen pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, Kondisi sosial, Disposisi sikap para pelaksana. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian Kurang terlaksana melaksanakan Peraturan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Tentang Tanggung Jawab Perusahaan PTPN V yakni tidak adanya peran Forum TJSP dalam pelaksanaan program Pembangunan Desa Pantai Raja, kurangnya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah daerah, tidak adanya transparansi terhadap potensi-potensi perusahaan dalam melaksanakan program CSR, masih kurangnya koordinasi lanjutan terkait program Pembangunan antara perusahaan dan Pemerintah Daerah, serta Masih kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antara Perusahaan dengan Pemerintah dan Masyarakat Setempat.

Kata kunci : Pelaksanaan, Peraturan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

**IMPLEMENTATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PTPN V
(STUDY THE CASE OF BEACH VILLAGE, PERHENTIAN DISTRICT
KING OF KING REGENCY**

Siti Marwah

Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Riau Islamic University, Jl. Kaharuddin Nasution No.13 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the corporate social responsibility program of PTPN V in Pantai Raja Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency, to determine the inhibiting factors. The research method used is a qualitative method. The theory used is the theory of implementation with established indicators, namely: Standard policies and objectives, Resources, Characteristics of implementing agents, Communication between organizations and implementing activities, Social conditions, attitude disposition of the implementers. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study were carried out to implement the Regulations on Corporate Social Responsibility in Pantai Raja Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency. Factors that hinder the implementation of the PTPN V Corporate Responsibility Regulations are the absence of the CSR Forum's role in the implementation of the Pantai Raja Village Development program, the lack of communication between the company and the local government, the lack of transparency on the company's potential in implementing CSR programs, and the lack of further coordination. related to the development program between the company and the local government, and the lack of communication and coordination between the company and the government and local communities

Keywords: Implementation, Regulations and Corporate Social Responsibility

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peran administrasi publik dalam suatu perusahaan atau organisasi sangat besar. Hal ini terlihat dari definisi administrasi publik yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan memelihara hubungan yang harmonis dengan pihak lain yaitu publik. Dalam hal ini administrasi publik memiliki peran komunikasi yang membentuk sebuah hubungan yang menciptakan mutual understanding antara organisasi dan publiknya.

Pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen, baik masyarakat, swasta, serta pemerintah. Pembangunan yang berkelanjutan perlu adanya upaya checks and balances, upaya tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah (mengawasi penyalahgunaan kewenangan), serta partisipasi pihak swasta (perusahaan) dalam mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ilmu administrasi publik dikenal sebagai studi yang mempelajari bagaimana organisasi publik mengelola dan memecahkan urusan dan masalah publik. Selama ini locus ilmu administrasi publik sosial dengan organisasi pemerintah atau birokrasi sebagai institusi pengemban pelayanan publik. Satu hal mendasar yang mendorong keberadaan administrasi sosial adalah menjalankan urusan publik yakni segala urusan bersama yang tidak dapat diselesaikan atau dilaksanakan secara individual. Masalah publik atau kepentingan publik menjadi landasan dari setiap tindakan dan kebijakan

administrasi publik. Adanya CSR menjadikan Paradigma dikotomi sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Manajemen problem dan kepentingan publik tidak lagi hanya menjadi kewajibannya administrasi publik, tapi dalam kasus tertentu juga melibatkan sektor non-government yakni sektor bisnis dan sektor ketiga (LSM dan organisasi non-profit). Agar perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah atau organisasi public harus dapat berfungsi menyediakan ‘enabling environment’ bagi CSR.

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*corporate social*) pada lingkungannya. Tanggung jawab Sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan Sosial, hidup berdasarkan aturan, nilai, dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan bagi perusahaan sendiri tanggung jawab sosial perusahaan dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR) yang merupakan sebuah konsep pertanggungjawaban dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan Sosial yang berangkat dari dampak akibat aktivitas operasi perusahaan sehingga menimbulkan efek negative baik dalam ruang lingkup perusahaan sendiri maupun lingkungan Sosial yang berada disekitar perusahaan.

Pada saat Industri berkembang setelah terjadi revolusi Industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Perusahaan memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, penyediaan kebutuhan masyarakat melalui produknya dan pembayaran pajak kepada Negara. Oleh karena itu

konsep *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam.

Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek Sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek Sosial dan lingkungan.

Secara umum pelaksanaan program CSR di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang undang-undang perseroan terbatas, yaitu tercantum dalam pasal 74 undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Dalam pasal tersebut diatur bahwa :

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang perseroan terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan CSR
2. Pasal 74 ayat (2) berbunyi tanggung jawab Sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban

3. Pasal 74 ayat (3) Undang-undang perseroan terbatas menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang perseroan terbatas menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Gambaran mengenai aturan-aturan tanggung jawab Sosial dan lingkungan atau CSR yang terlihat ideal, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hukumnya. Realisasi di masyarakat, kontroversi terpusat pada masyarakat Sosial yang berada di sekitar operasional perusahaan, khususnya perusahaan ekstraktif atau pengelola Sumber Daya Alam (SDA).

Bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kampar merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kampar. Upaya tersebut terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat. Para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan Sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan Peraturan Daerah.

Salah satu kunci hadirnya CSR adalah isu mengenai pentingnya hubungan harmonis antara pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta pihak perusahaan itu sendiri (shareholders). Stakeholders yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang akan diterapkan serta pihak-pihak yang terkait dampak operasional perusahaan (Rahmatullah, 2017).

Termasuk di dalamnya adalah pekerja, pemasok, pengguna, pemerintah sebagai pembuat peraturan, masyarakat, serta pemilik perusahaan itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh William C. Frederick, Keith Davis, dan James E. Post (1988) dalam buku yang berjudul “*Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*”.¹¹ CSR merupakan bentuk tanggung jawab atau kepedulian perusahaan terhadap lingkungan maupun kepedulian Sosial dengan cara melindungi serta memberi kontribusi pada masyarakat di mana perusahaan itu berada.

Salah satu teori CSR yang berkembang adalah teori kontrak Sosial (*social contract theory*). Teori ini menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan kehidupan serta elemen-elemen Sosial. Berdasarkan teori ini, perusahaan mesti bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sikap ini timbul bukan hanya karena keinginan yang kuat untuk meraih keuntungan (nilai ekonomis), melainkan perusahaan harus bersikap sesuai dengan persepsi yang diinginkan masyarakat terhadap perusahaan dalam menjalankan bisnis. Sehingga perubahan persepsi masyarakat terhadap perusahaan menyebabkan perusahaan harus menyesuaikan teknis pelaksanaan CSR. Teori kontrak Sosial ini menyebabkan CSR tidak

mempunyai standar yang sama antara satu kelompok masyarakat dan masyarakat lainnya. Persepsi masyarakat yang berbeda-beda akan menyebabkan konsep CSR berubah kapan saja karena persepsi masyarakat juga berubah-ubah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bahwa: “Tujuan umum program TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien”.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar No 3 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada pasal 9 dikatakan bahwa perusahaan wajib menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan perundangan yang berlaku.

PT. Perkebunan Nusantara V adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Agroindustri kelapa sawit dan karet yang berkantor pusat di Pekanbaru, dengan lokasi kerja di provinsi riau, dibentuk berdasarkan PP. Nomor. 10 Tahun 1996 tentang penyetoran modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusanatara V. Untuk mengelola komoditi kelapa sawit, perusahaan memiliki 12 unit pabrik kelapa sawit (PKS), 24 unit kebun usaha yang ada di Provinsi Riau, dan satu unit pabrik palm kernel oil untuk mengolah lanjut inti komoditi inti sawit. PT. Perkebunan Nusantara V ini

terbagi dalam beberapa unit kebun yang tersebar di beberapa kabupaten. Salah satunya adalah PT. Perkebunan Nusantara V wilayah Kabupaten Kampar.

Peran perusahaan untuk mendukung pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat tentu tidak dalam koridor bisnis semata dimana sebagai bentuk tanggung jawab Sosial perusahaan kepada masyarakat dengan melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan membantu pemerintah dalam pembangunan daerah. PT. Perkebunan Nusantara V Wilayah Kabupaten Kampar membagi dua bentuk program CSR yaitu program Bina Lingkungan dan program kemitraan. Sasaran penerapan program CSR yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara V Wilayah Kabupaten Kampar adalah masyarakat, terutama yang berada disekitar perusahaan beroperasi. Penerapan program CSR ini disesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh kantor pusat.

Program CSR yang akan dilaksanakan terlebih dahulu diajukan ke kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara V, dengan persetujuan dari kantor pusat maka turunlah anggaran untuk realisasi dari program CSR yang ada di PT. Perkebunan Nusantara V Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan CSR dikeluarkan berdasarkan laba bersih yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya. Dana yang disalurkan untuk program CSR dimulai sejak tahun 1996. Tujuan program CSR PT. perkebunan Nusantara V Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah Citra

perusahaan mengalami peningkatan, Kerjasama dengan para pemangku kepentingan menjadi lebih baik dan Masyarakat menjadi lebih inovatif.

Tabel I.I Progam CSR Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2020-2021

No	Nama Desa	Progam CSR
1.	Kampung Pinang	10
2.	Lubuk Sakat	8
3.	Pantai Raja	20
4.	Hangtuah	14
5.	Sialang Kubang	16
	Total	68

Sumber : Kantor PTPN V Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, 2021

Dalam penelitian Ini Penulis mengambil penelitian Di Desa Pantai Raja yang mempunyai 20 Progam CSR yang ada, dalam pelaksanaan Progam Csr di desa Pantai masih adanya jalan yang berlubang di karenakan Desa pantai raja sering dilalui Kendaraan truck bermuatan Sawit. Mengakibatkan jalanan rusak dan berlubang. Jalanan yang berlubang Di Jalan Poros Pantai Raja jalan Tersebut adalah jalan Utama Desa Pantai Raja yang sering dilalui oleh Masyarakat Desa Pantai Raja. Jalan yang rusak di desa Pantai Raja, +- 10 meter yang jalanan berlubang, berada di beberapa titik yang berbeda.

Dari 20 progam CSR yang dilakukan, 5 Progam Desa yang memperbaiki jalanan Desa Pantai Raja yaitu :

1. Semenisasi
2. Penimbunan Jalan
3. Penambalan Aspal berlobang

4. Pengerasan Jalan

5. Pengaspalan jalan

Dari 5 program jalan Desa Pantai raja 3 program yang belum berjalan Di Desa Pantai Raja yaitu: Penambalan Aspal yang berlobang, Pengerasan Jalan dan Pengaspelan jalan di Desa Pantai Raja.

Penelitian ini akan fokus pada kajian Program CSR PT. Perkebunan Nusantara V dalam Perbaikan Jalan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berikut adalah rencana CSR PT. Perkebunan Nusantara V pada tahun 2020 untuk wilayah sekitar perusahaan.

Tabel I.II Program CSR PT.Perkebunan Nusantara V Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tahun 2020-2021

No	Bidang Pembangunan	Target	Realisasi	Tidak Terealisasi
1.	Infrastruktur jalan	5	2	3
2.	Infrastruktur bangunan pemerintahan	1	1	
3.	Infrastruktur Bangunan Mushola	14	10	4
Total		20	13	7

Sumber: Desa Pantai Raja, 2022

Dilihat dari program bina lingkungan tersebut jenis bantuan yang diberikan sarana prasarana dan infrastruktur., berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kampar merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kampar. Upaya tersebut terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan

masyarakat. Para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya. Selain itu penulis juga menemukan masalah lainnya seperti Program CSR cenderung tidak tepat sasaran dalam penyaluran mekanisme, temuan ini dibuktikan dengan beberapa kepala desa di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang menuturkan sebagaimana berikut:

“Kita pernah meminta dukungan dana untuk pembuatan jembatan ya, itu memang dibantu, namun sangat jauh dari ekspektasi kita. Saat itu kami meminta bantuan sebanyak Rp 15.000.000 lebih, namun dana yang cair kalau tidak salah itu Rp 6.000.000., mau tidak mau ya kita terima tentunya. Meskipun tidak mencukupi ya. Wawancara dengan Kepala Desa Pantai Raja (Lokasi wilayah kantor PTPN V).

Bantuan CSR hanya diberikan 1 kali dan tidak bersifat berkelanjutan hingga tuntas. CSR yang diberikan PTPN V hanya sekali saat pengajuan dan bersifat tidak sampai tuntas ataupun bertahap. Perusahaan sendiri mengklaim telah mengimplementasikan berbagai kegiatan program CSR dengan menggelontorkan sejumlah dana, di tahun 2018-2020 yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan CSR seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kondisi nyata di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda, penggelontoran sejumlah dana tidak memberikan pengaruh signifikan bagi kehidupan warga, bahkan sebagian warga mengklaim tidak pernah mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan padahal lokasi tempat tinggalnya adalah desa terdekat dan terdampak dari kegiatan ekstraksi perusahaan. Pengajuan yang dilakukan oleh Sebagian Masyarakat mempunyai

keakraban terhadap pihak perusahaan yang menjadikan proposal sampai kepada pihak Perusahaan langsung,

Perusahaan dalam hal ini belum mampu merealisasikan program community development dengan baik karena muara dari program community development merupakan pemberdayaan masyarakat. Proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan memberi peluang kerja bagi masyarakat lokal. Terlepas dari jumlahnya, sebagian dari masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan mendapatkan kesempatan bekerja pada perusahaan tersebut. Proses produksi selain itu juga merangsang munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah operasinya. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Kondisi ini bisa berubah sebaliknya ketika proses ekstraksi berhenti karena sumber daya alamnya sudah tidak dapat dieksploitasi. Masyarakat yang sebelumnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya, tidak memiliki lagi kesempatan tersebut. Terlebih lagi jika perusahaan-perusahaan sudah habis masa kontraknya dan harus meninggalkan daerah operasinya, masih menyisakan masalah kerusakan fisik lingkungan dan pencemaran yang diakibatkan proses produksi yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan masyarakat lokal karena kerusakan lingkungan bisa menimbulkan erosi, banjir, dan tanah longsor, sementara pencemaran bisa mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Temuan peneliti di lapangan bahwa Jalan yang dilewati oleh perusahaan PTPN V, banyak yang terjadi kerusakan dikarenakan jalan tersebut dilewati oleh truck pemuat sawit yang perkiraanya sampai 10-15 ton dalam

pengangkutan buat sawit ke arah Perusahaan. Di daerah Kecamatan Perhentian raja banyak yang memiliki perkebunan sawit yang hasil sawitnya di jual ke persahaan PTPN V untuk itu jalan yang di desa pantai raja sering di lewati oleh truck pemuat sawit.

Sebagai salah satu Perseroan perkebunan milik negara yang telah cukup lama bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet, sampai saat ini Perseroan tetap fokus pada kedua bidang usaha andalan tersebut. Untuk meningkatkan kinerjanya, Perseroan melakukan berbagai usaha antara lain meningkatkan volume dan kualitas produksi hasil olah minyak sawit (CPO), inti sawit, Palm Kernel Oil (PKO), Palm Kernel Meal (PKM), Ribbed Smoked Sheet (RSS), Standard Indonesia Rubber 10/20 (SIR 10/20) dan produk lainnya. Dengan mutu hasil produksi sesuai standar nasional dan internasional diharapkan komoditikomoditi tersebut dijual dan dipasarkan dengan hasil yang optimal. Selain itu Perseroan melakukan efisiensi dan efektifitas di semua lini produksi termasuk didalamnya kegiatan pembukaan lahan, penanaman ulang, pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan kegiatan lainnya seperti pengembangan kebun plasma.

Standard Operating Procedure atau Standar Operasional Prosedur adalah sekumpulan peraturan, pedoman, atau acuan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Tujuannya untuk menjadi acuan melaksanakan proses kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sumber daya manusia yang ada di perusahaan.

SOP juga menjadi indikator penilaian kinerja baik itu bagi instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Hal ini karena SOP telah dibuat sesuai dengan indikator-

indikator teknis, administratif, dan prosedural yang telah disesuaikan dengan proses kerja dan unit kerja yang terlibat.

Selain kedua alasan utama tersebut, ada juga alasan lain mengapa SOP sangat penting dalam perusahaan :

1. Memetakan peran dan posisi masing orang dalam perusahaan
2. Memberikan kejelasan arah mengenai proses kerja dan tanggung jawab masing-masing individu
3. Menjadi penjelasan terkait hubungan antar masing-masing proses kerja
4. Menjaga konsistensi dalam menjalankan proses kerja dan setiap kegiatan operasional
5. Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan proses kerja
6. Memudahkan evaluasi dari setiap proses kerja yang terjadi

Perkebunan buah kelapa sawit : Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kegiatan CSR PTPN V Wilayah Kabupaten Kampar yang dilakukan perusahaan belum mampu menyelesaikan permasalahan utama kemiskinan dan lingkungan yang dihadapi masyarakat lokal. Esensi dari program pengembangan masyarakat seharusnya mampu menyelesaikan kedua masalah tersebut dan pada saat yang sama juga menyiapkan masyarakat lokal

supaya mandiri pasca ekstraksi. Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa masalah yang dirangkum penulis sebagai berikut:

1. Dari target 5 Program Pembangunan Jalan CSR PTPN V Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar bidang pembangunan Jalan masih ada 3 program yang belum terlaksana.
2. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program PTPN V di Desa Pantai Raja dalam perbaikan jalan masih adanya jalanan yang berlubang, mengakibatkan masyarakat Desa Pantai Raja terganggu, dalam melakukan aktifitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar)?
2. Apa saja Faktor yang hambatan Pelaksanaan Peraturan Tentang CSR Perusahaan PTPN V Wilayah Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar).

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Tentang CSR Perusahaan PTPN V Wilayah Kabupaten Kampar

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu Administrasi.
- b. Kegunaan praktis untuk meningkatkan keterampilan penelitian dalam mengarahkan dan menyediakan data dan fakta secara sistematis.
- c. Kegunaan akademis sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang dilakukan penelitian yang sama



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam upaya memecahkan masalah penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan dan meninjau pada teori yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sehingga dalam hal tersebut diharapkan dapat memberikan dasar dan arahan bagi penelitian yang dilakukan.

1. Administrasi

Administrasi berdasarkan etimologis bersumber dari bahasa latin yang terdiri dari *ad* + *ministrare*, yang secara operasional berarti melayani, membantu dan memenuhi. Dalam bahasa asalnya terbentuk kata benda *administration* dan kata sifat *administrativus*. Sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi *administration* dan dalam bahasa Indonesia menjadi *administrasi*. (Hadari, 1994:23).

Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan

dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*)

2. Administrasi dalam arti luas berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris),
 - a. Menurut H. A. Simon mengemukakan bahwa “*Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*” (administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama)
 - b. Menurut Luther Gulick mengemukakan bahwa “*Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives*” (administrasi adalah yang berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan)
 - c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai: Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kegiatan kantor dan tata usaha. (Afifuddin, 2010:3-4)

Administrasi mempunyai ciri-ciri yang menjadi dasar dalam proses kegiatan administrasi, yaitu:

1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih.
2. Adanya kerja sama dari kelompok tersebut.
3. Adanya kegiatan atau proses atau usaha.
4. Adanya bimbingan dan kepemimpinan.
5. Adanya tujuan yang telah disepakati bersama.

2. Administrasi Publik

Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi Negara. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam Waluyo, 2007:35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat terkait definisi administrasi publik. Seperti pendapat menurut Siagian (dalam Andry 2015:14) bahwa Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Kemudian Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) juga berpendapat bahwa administrasi public adalah proses dimana sumber daya dan personil public memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) yaitu sebagai berikut:

- a. Organisasi Publik, yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.

- b. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan public dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Sedangkan menurut Kasim (1994: 8) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik. Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994:23).

Sedangkan Siagian (dalam Waluyo, 2007:37) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Proses administrasi sebagai proses politik juga dikemukakan oleh Dimock (1996:40) merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini bisa dipahami, karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi, administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Suradinata (1993:33) Perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang, dimana pemahamannya dilihat dari paradigma. Perkembangan paradigma tersebut menggambarkan adanya perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi serta nilai-nilai yang mendasari.

3. Organisasi

Menurut Robbins (1994:4) mengatakan, bahwa: Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ciri-ciri organisasi dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handayaniingrat (1985:3) sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya / tenaganya

4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
5. Adanya suatu tujuan

4. Organisasi Publik

Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (*publik goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu (Samuelson, 1945). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula.

Beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Ciri-ciri organisasi publik menurut Levin dkk (1990) dalam Dwiyanto (1995) adalah sebagai berikut :

1. Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu
2. Organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya.

3. Organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam
4. Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada
5. Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar
6. Organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar
7. Organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas
8. Organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan
9. Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik
10. Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi dari pada sektor privat.

Berdasarkan teori di atas, tampak bahwa organisasi publik memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi bisnis hanya memperhitungkan konsumen dan para pesaing. Sementara organisasi publik harus memperhitungkan berbagai komponen yang lebih luas.

5. Manajemen

Menurut G.R. Terry (2010;16) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mennetukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Handoko (2009:8) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan

Sedangkan menurut Hasibuan (2013;1), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Adapun fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya : menurut G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:10), membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu:

- a. *Planning* (perencanaan) Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b. *Organizing* (pengorganisasian) Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan

terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan

- c. *Actuating* (pelaksanaan) Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
- d. *Controlling* (pengawasan) Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

6. Manajemen Publik

Pada dasarnya public management atau manajemen publik, yaitu instansi pemerintah. Overman dalam Keban (2004 : 85), mengemukakan bahwa : Manajemen publik bukanlah scientific management, meskipun sangat dipengaruhi oleh scientific management. Manajemen publik bukanlah *policy analysis*, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi rationalinstrumental pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. Public management adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Berdasarkan pendapat Overman tersebut, OTT, Hyde dan Shafritz (1991:xi), mengemukakan bahwa "manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih". Untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Menurut Ramto (1997:14) manajemen pemerintahan (*public management*) adalah : Faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, manajemen pemerintahan, tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya (Kristiadi, 1994: 23).

7. Teori Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *Policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb): pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kata kebijakan secara *etimologis* berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *Policy* sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *Wisdom*. Dalam konstek tersebut penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses politik (Islamy, 2007:12).

Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2012:18) mengatakan bahwa secara umum, istilah “kebijakan” atau “*Policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah faktor dalam suatu bidang atau bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik yang lebih tepat.

Menurut Syafiie (2014:145) menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*Wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah.

Dye dalam Syafiie (2014:145) menambahkan bahwa perhatian utama kepemimpinan pemerintah adalah *public policy* (kebijakan pemerintah), yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu, atau tidak mengerjakan

sama sekali (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*).

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2014:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut James E Anderson dalam Islamy (2009:17), kebijakan adalah: *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut Agustino (2014:7), bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Anderson dalam Agustino (2014:7), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2012:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2014:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Mustopadidjaja dalam Nawawi (2013:90) merumuskan kebijakan publik sebagai fenomena yang kompleks dan dinamis yang dapat dikaji berbagai disiplin ilmu dan tingkatan kompleksitas serta dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan diarahkan atau ditujukan pada proses kebijakan sementara itu, dalam perspektif manajemen.

Menurut Nawawi (2013:88) dalam semua tahapan pelaksanaan kebijakan pemerintahan peran dan fungsi pemerintah tidak bisa dianggap kecil, meskipun sudah bergeser titik tekannya. Dalam kenyataannya, hampir tidak ada kegiatan privat yang tidak terkait atau tidak berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan pemerintah khususnya dengan apa yang disebut birokrasi. Aparatur birokrasi senantiasa menjadi ujung tombak dalam merealisasikan atau menerjemahkan

kebijakan agar menjadi sesuatu yang nyata yaitu mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya bersama semua *stakeholders* yang terlibat dalam proses perumusan dan pengambilang kebijakan. Dimana, khususnya di negara berkembang adalah birokrasi yang menjadi tumpuan dari pelaksanaan kebijakan sekalipun peran dan fungsi masyarakat semakin penting dan menentukan

8. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. (Meter dan Horn dalam Subarsono (2005 :99):

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis
- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Sedangkan Fungsi Pelaksanaan adalah (Meter dan Horn dalam Subarsono (2005:99)

:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan

3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Menurut Van Meter (2008) Indikator keberhasilan pelaksanaan atau implementasi adalah:

1. Standar kebijaksanaan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
2. Sumber daya: kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Karakteristik agen pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana: implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola

komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik: pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program
6. Disposisi sikap para pelaksana: persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya

9. Pembangunan Berkelanjutan

Pengertian Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan. (Pendidikan, 2016) Menurut Budiharjo dan Sudjarto (2012) pengertian pembangunan berkelanjutan adalah kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. *World Commission On Enviromental Development* (WCED) pada tahun 1987

merumuskan bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Sudharta P. Hadi dalam bukunya yang berjudul "*Opcit*" tahun 2007 menyebutkan pengertian pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. Dengan demikian, dalam upaya untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan kota dan wilayah yang berorientasi *market driven* (ekonomi), dimensi sosial, lingkungan dan budaya sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan. (Pengertian Pembangunan Berkelanjutan Menurut Para Ahli, 2016).

10. CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Suatu konsep yang banyak diperbincang oleh para ahli, CSR belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, meskipun memiliki esensi yang sama.

Johnson and Johnson (2006:112) mendefinisikan "Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society"

Definisi ini diangkat dari filosofi tentang bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk mendapatkan

dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara dunia, lewat publikasinya “*Making Good Business Sense*” mendefinisikan *Corporate Social Responsibility*:

“Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”

Definisi tersebut menunjukkan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan satu bentuk tindakan yang diangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

Ranah tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggungjawab CSR juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (Stakeholder). Karena itu dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab CSR.

Crowther David (2008:201) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab CSR menjadi tiga, antara lain yaitu:

a. Sustainability

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Karena itu sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang

b. Accountability

Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal (Crowther David, 2008:203). Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan. Tingkat keluasan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi stakeholder eksternal, serta meningkatkan transaksi saham perusahaan.

Keterbukaan perusahaan atas aktivitas tanggungjawab sosial menentukan respon masyarakat bagi perusahaan. Namun informasi yang bersifat negatif justru menjadi bumerang perusahaan, dan cenderung memunculkan image negatif. Menurut Crowther David (2008: 203) menyatakan akuntabilitas dan keterbukaan memiliki kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan. Agar informasi dalam laporan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas memenuhi kualifikasi, maka akuntabilitas seharusnya mencerminkan karakteristik antara lain:

1. *Understand-ability to all parties concerned*
2. *Relevance to the users of the information provided*
3. *Reability and terms of accuracy of measurement, representation of impact and freedom from bias*
4. *Comparability, which implies consistency, both over time and between different organisations*

c. Transparency

Merupakan perinsip penting bagi pihak eksternal. Transaparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal.

CSR (*Corporate Social Responsibility*), dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena, keberadaan perusahaan ditengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif. Khusus dampak negatif memicu reaksi dan protes stakeholder, sehingga perlu

menyeimbangkan lewat peran *Corporate Social Responsibility* sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan.

Edi Suharto (2008:3) menyatakan keberpihakan sosial perusahaan terhadap masyarakat mengandung motif, baik sosial maupun ekonomi. CSR memiliki kemanfaatan (konsekuensi) baik secara sosial maupun konsekuensi ekonomi. Biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan memiliki manfaat meningkatkan kinerja sosial, yaitu meningkatkan legitimasi dan mengurangi komplain stakeholder. Disamping itu, biaya sosial (biaya keberpihakan perusahaan terhadap stakeholder) juga dapat meningkatkan image baik dipasar komoditas maupun pasar modal.

Kendati CSR memiliki kemanfaatan secara sosial dan ekonomi, namun ternyata perusahaan memandang secara berbeda. Perbedaan persepsi tersebut berada secara diametral, yaitu terdapat perusahaan yang memandang bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan merupakan kewajiban, bahkan CSR mengandung biaya yang relatif besar yang justru mengganggu profitabilitas perusahaan. Sementara terhadap kelompok pelaku bisnis beranggapan, bahwa CSR merupakan investasi jangka panjang, dan memiliki manfaat dalam meningkatkan image dan legitimasi, sehingga dapat dijadikan, sebagai basis konstruksi strategi perusahaan.

Cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial ke dalam tiga persepsi, yaitu:

1. Perusahaan melakukan CSR sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Artinya perusahaan melakukan CSR lebih karena mematuhi anjuran peraturan dan perundangan, maupun tekanan eksternal. Disamping itu, perusahaan

melakukan tanggungjawab juga untuk membangun image positif, sehingga CSR bersifat jangka pendek, karitatif, insidental dan sebatas lames. Contoh riil adalah pelaksanaan bantuan saat bencana alam, dimaksudkan untuk meningkatkan simpati terhadap perusahaan. Kegiatan tersebut tidak sampai pada mendorong penguatan kehidupan masyarakat pasca bencana

2. CSR dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban. Disini, CSR dilakukan atas dasar anjuran regulasi yang harus dipatuhi seperti undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, keputusan menteri nomor KEP-04/MBU/2007 tentang program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan
3. Perusahaan melakukan CSR bukan hanya sekedar kewajiban namun beyondcompliance. Disini CSR didudukkan sebagai bagian dari aktivitas perusahaan. CSR tumbuh secara internal. Sikap terbuka dalam memandang CSR telah masuk dalam berbagai rana. Tanggungjawab perusahaan tidak hanya diukur dari economic measurement, namun juga sebagai upaya mematuhi peraturan dan perundangan, dan tanggungjawab masyarakat dan lingkungan. CSR didudukkan sebagai kebutuhan dalam mendukung going concern, dan merupakan investasi jangka panjang, yang dapat mendukung perusahaan. CSR bukan sekedar polesan, namun CSR bagian dari strategi dan jantung perusahaan. Perusahaan melakukan kreasi praktik CSR dan menjadi kebijakan integral terhadap strategi operasi lain. Perusahaan secara

eksplisit memasukkan CSR kedalam Visi dan Misi, sehingga menjadi landasan filosofi operasional.

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam Penerapan CSR, antara lain yaitu:

1. Perencanaan CSR butuh perumusan yang jelas, baik materi, strategi, sasaran, penelitian pemangku kepentingan, maupun anggaran yang dibutuhkan. Untuk itu, butuh kajian mendalam dan berkelanjutan, khususnya dalam menentukan isi dan sasaran agar memiliki daya dukung dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pada para pemangku kepentingan. Kualitas perencanaan praktik tanggungjawab sosial perusahaan/CSR tergantung pada analisis perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Program menjadi penting karena dapat dijadikan arah untuk melaksanakan (*implementasi*) pelaksanaan program. Di samping itu, perencanaan juga menentukan strategi yang lebih efektif dapat dilaksanakan.
2. Implementasi *Corporate Social Responsibility* Implementasi CSR merupakan tahap aplikasi program CSR sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Penerapan CSR membutuhkan iklim organisasi yang saling percaya dan kondusif, sehingga memunculkan motivasi dan komitmen karyawan pelaksana. Pada dasarnya, belum terdapat formula yang dapat dijadikan acuan ideal dalam implementasi CSR. Terdapat banyak prinsip yang harus dijadikan dasar dalam praktik CSR

Ghazali dan Chariri (2007:409) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholders* (shareholders, kreditor, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Gray et al (1995) mendefinisikan dalam Ghazali dan Chariri (2007:409) kelangsungan hidup suatu perusahaan tergantung pada dukungan para *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut untuk keberlangsungan hidup perusahaan, semakin kuat *stakeholders*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari komunikasi antara perusahaan dengan para stakehoders (Ghazali dan Chariri 2007:409).

11. Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut

tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian

Richard M. Steers (1999) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut :

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja

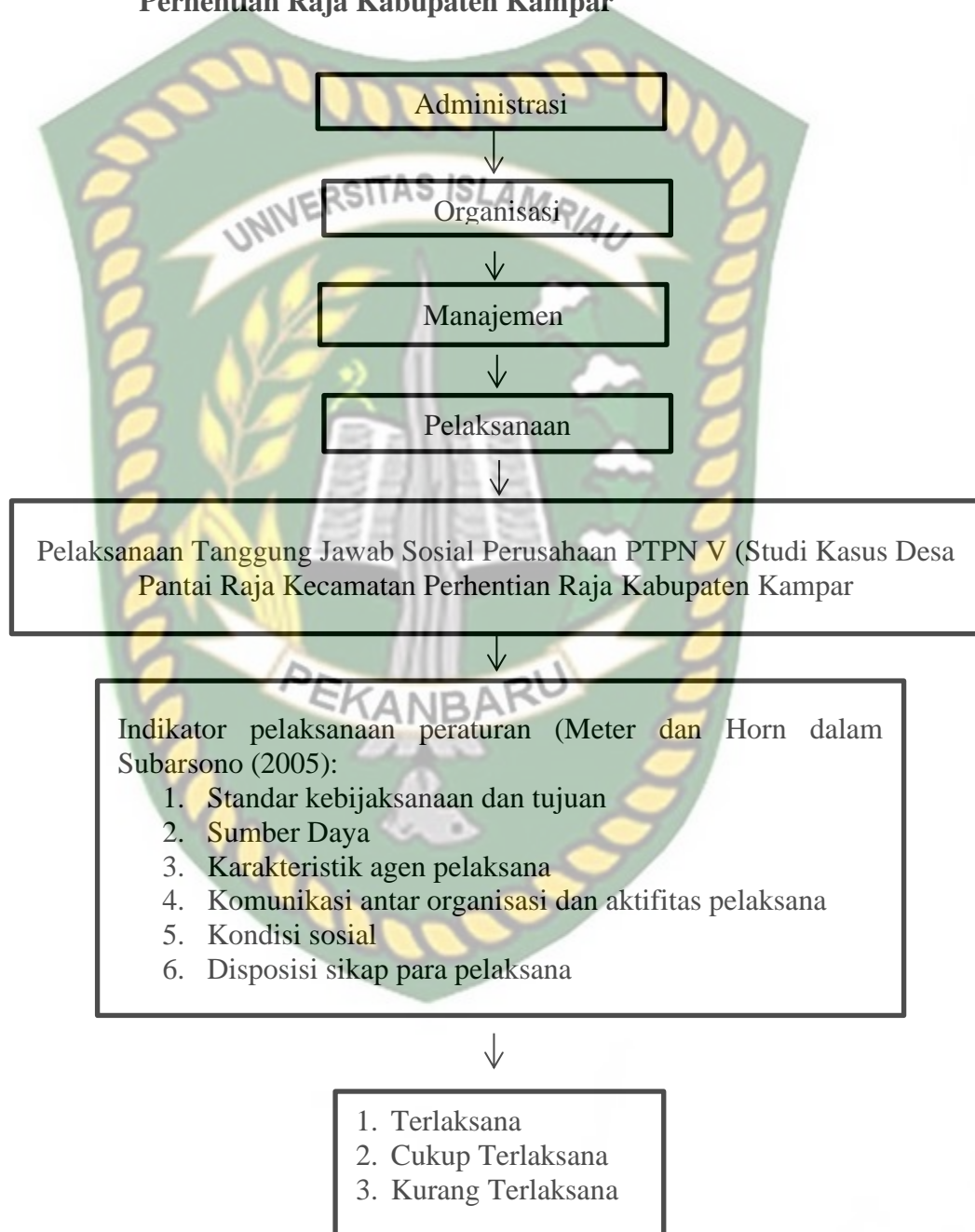
B. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta dalam melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, kemudian diukur dengan teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka peneliti menjelaskan hubungan unsur-unsur dalam penelitian ini kedalam gambaran alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 : Kerangka Pikiran Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoprasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain yaitu :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak.
3. *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang ada diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
4. Pelaksanaan peraturan dalam penelitian ini di ukur dari beberapa indicator implementasi kebijakan yaitu :

- a. Standar kebijaksanaan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan CSR secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
- b. Sumber daya: kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
- c. Karakteristik agen pelaksana: meliputi karakteristik PTPN V yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program CSR, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen CSR, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan CSR.
- d. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana: implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik: pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik,

dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

- f. Disposisi sikap para pelaksana: persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian pada tabel dibawah ini:



Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala penilaian
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Meter dan Horn dalam Subarsono (2005 : 99):	Pelaksanaan Program CSR	1. Standar kebijaksanaan dan tujuan	1) Tujuan keputusan 2) Penilaian kinerja program 3) Para pelaksana kebijakan	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		2. Sumber Daya	1) Dana 2) Insentif	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		3. Karakteristik agen pelaksana.	1) Mekanisme 2) <i>Prosedur institusional</i> 3) Kebijakan yang dilakukan 4) Disiplin 5) Cakupan wilayah	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		4. Komunikasi antar organisasi antar organisasi	1) Koordinasi Komunikasi 2) Sumber Informasi	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		5. Kondisi sosial	1) Sikap menolak dan 2) Netral Menerima 3) Lingkungan eksternal Konsusif	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		6. Disposisi sikap para pelaksana	1) Pemahaman dan pendalaman kebijakan 2) Arah Respon 3) Instansi terhadap kebijakan	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif ditujukan pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi; juga menyelidiki dengan teknik survey, interview, angket, observasi, atau dengan teknik test; studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ialah metode menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan atau korelasi, kegiatan, pandangan, sikap yang tampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan dan anomali yang sedang muncul, kecenderungan yang tampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. Tujuan utama penggunaan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabelvariabel yang saling terkait. Tujuannya ialah agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda (Rahardjo, 2010). Ada delapan jenis penelitian kualitatif, yaitu: etnografi, studi kasus, studi dokumen/teks, observasi.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Perusahaan PTPN V Wilayah Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih Perusahaan PTPN V Wilayah Kabupaten Kampar adalah Program CSR PTPN V Wilayah Kabupaten Kampar belum menjangkau kebutuhan pembangunan infrastruktur masyarakat serta Program CSR cenderung tidak bersifat continue pada satu bidang. Dimana perusahaan hanya memberikan bantuan jika ada pengajuan dari masyarakat namun tidak ada tahap perawatan dari infrastruktur yang dibangun.

C. Key Informan dan Informan

Menurut Maleong (2006:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun yang menjadi keyinforman dalam penelitian ini adalah Pimpinan, karyawan di Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan PTPN V Wilayah Kabupaten Kampar yang terdiri dari pimpinan dan karyawan 8 orang, serta Masyarakat yang mendapat bantuan CSR di Kabupaten Kampar sebanyak 10 orang.

Tabel III.1 Key informan dan Informan Penelitian

No	Sub Populasi	Key Informan	Informan
1	Pimpinan Perusahaan PTPN V Wilayah Kabupaten Kampar	1	
2	Camat Perhentian Raja	1	
3	Kepala Desa Pantai Raja	1	
3	Forum CSR Kampar		3
4	Karyawan bagian CSR		1
5	Masyarakat Desa Pantai Raja yang mendapat bantuan CSR		5

Sumber : PTPN V Desa Pantai Raja, 2022

Mengingat waktu, tenaga, biaya dan populasinya cukup besar, maka penulis menggunakan teknik Purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan informan yang sudah diketahui sebelumnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pimpinan, karyawan dan masyarakat yang mendapatkan bantuan Program CSR PT. Perkebunan Nusantara V

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini menurut Sugiyono (2012:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta actual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :



Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Februari				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Wawancara																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfresif																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribukota Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarahwan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Rokah Hulu dan Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelelawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VIII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang (ibu kota: Bangkinang).
2. Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok).
3. Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai).
4. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian).
5. Kampar (ibu kota: Air Tiris).
6. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain).
7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar).
8. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema).
9. Kampar Timur (ibu kota: Kampar).
10. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah).

11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja).
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak).
13. Salo (ibu kota: Salo).
14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru).
15. Tambang (ibu kota: Sei.Pinang).
16. Tapung (ibu kota: Petapahan).
17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin).
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek).
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat).
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang).
21. Koto Kampar Hulu (ibukota: Tanjung)

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2010 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai *Oughang Kampar*, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia, 1953*, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing – masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

B. Pemerintah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Susunan organisasi pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kampar terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan masing-masing Kepala Dinas yang ada di Kabupaten Kampar untuk membantu menjalankan Visi dan Misi Bupati

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.

Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU NO 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Arti Lambang Kabupaten Kampar adalah Sebagai berikut :

1. Benteng Dan Perisai adalah melambangkan kekuatan dan kekebalan rakyat dalam berjuang dan membangun
2. Batu Bersusun adalah melambangkan persatuan Nasional yang kuat, kokoh, serta menimbulkan inspirasi membangun
3. Tujuh Belas Buah Batu Bersusun adalah menunjukkan tanggal tujuh belas hari proklamasi
4. Delapan Buah Batu Bata adalah menunjukkan bulan delapan (bulan Agustus)
5. Empat Dan Lima buah dibawah menunjukkan tahun 45 (1945)
6. Satu Pintu Gerbang adalah melambangkan pintu kemakmuran

7. Bintang Bersudut Lima adalah melambangkan Pancasila
8. Pohon Karet adalah melambangkan sumber dari kemakmuran rakyat
9. Tujuh Belas Butir Padi dalam setangkai dan Lima Cabang Pohon Karet adalah melambangkan bahwa negara Republik Indonesia diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila
10. Empat Buah Puncak Benteng adalah melambangkan adat istiadat yang menjiwai prikehidupan rakyat
11. Rusa adalah melambangkan sifat-sifat ketangkasan, kecakapan, kelincahan dan keuletan
12. Peta Kabupaten Kampar menyatakan daerah kabupaten Kampar
13. Menara Minyak Dan Tangki adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan gas bumi
14. Satu Lorens dengan Dua Gerobak Lori adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan bahan-bahan logam

Visi Dan Misi Kabupaten Kampar

VISI

"Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2020"

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah :

Seluruh komponen Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran logis yang berakal budi, dan menghormati serta

menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat Kabupaten Kampar.

Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan dirinya pesaing yang tangguh menghadapi persaingan global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta diperlakukan secara adil.

Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan masyarakat yang agamis dimana dalam segala aspek kehidupan yang dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, dengan harapan Kabupaten Kampar dapat menjadi Serambi Mekah di Propinsi Riau.

Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Kabupaten Kampar sebagai berikut, yaitu :

Misi-I

Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global

Misi ini bermaksud:

1. Menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis kedalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.
2. Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong (batobo) serta usaha-usaha antisipatif menghadapi pengaruh global.

3. Menguatkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.

Misi-II

Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.

Misi ini bermaksud:

1. Membangun e-government berbasis good governance yang amanah dan berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat Kampar.
2. Mengembangkan sistim manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah, baik sumberdaya alam, teknologi, budaya, dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien, dan efektif, dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kepastian hukum.

Untuk mewujudkan maksud diatas, perlu didukung oleh Kemampuan individu aparatur pemerintah yang punya motivasi, kepercayaan diri, jujur, dan inovatif melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi pemerintahan

Misi – III

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berwawasan kedepan.

Misi ini bermaksud mewujudkan:

1. Sehat jasmani dan rohani yang memiliki mentalitas dan kemampuan dalam mengembangkan diri, dan berperan dalam membangun daerahnya;
2. Dapat menguasai dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tuntutan pembangunan daerah;
3. Berpikiran maju untuk mengembangkan diri dan memiliki wawasan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memajukan daerah.

Misi – IV

Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun internasional.

Misi ini bermaksud mewujudkan:

1. Pengembangan usaha produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat berskala kecil dan menengah yang berorientasi pasar dan industri pengolahan hasil pertanian untuk mendapatkan nilai tambah.
2. Menguatkan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat yang berorientasi pasar yang dikembangkan agar tercipta kemampuan bersaing dan bermitra dengan pesaing pasar lainnya untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

3. Mengembangkan sistem dan jaringan data dan informasi serta promosi potensi unggulan daerah.
4. Membangun sentra perdagangan dan industri serta pariwisata yang berbasis teknologi
5. Mendorong pertumbuhan investasi melalui pola kemitraan yang sejajar dan proporsional antar swasta, masyarakat, dan pemerintah dalam bentuk kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasilnya.

Misi – V

Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan

Misi ini bermaksud:

1. Melakukan penataan ruang atau kawasan sesuai dengan peruntukannya secara serasi, harmonis, terpadu, dan seimbang diselaraskan dengan daya dukung lingkungannya.
2. Penataan ruang atau kawasan dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan daerah harus selalu dalam kendali pemerintah agar keserasian, keharmonisan, keterpaduan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dapat terjaga dan terpelihara sehingga tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Misi – VI

Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama

Misi ini bermaksud:

1. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran dan aturan agama dan menjadikannya landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Menjamin keamanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa melalui jalur pendidikan, pelatihan dan pembinaan.
4. Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Terciptanya kedamaian hidup umat beragama baik interen umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah.
6. Menciptakan lingkungan kehidupan yang bernuansa agamis dalam berbagai aspek pembangunan

C. Desa Pantai Raja

Pantai Raja merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia. Desa Pantai Raja memiliki luas wilayah

sebesar 6218 km². Dan sudah terdata jumlah penduduk mencapai kisaran 4471 jiwa. Kecamatan Perhentian Raja adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan perhentian raja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar dengan pusat pemerintahan berada di Desa Pantai Raja. Kecamatan Perhentian Raja terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Pantai Raja, Desa Hang Tuah, Desa Kampung Pinang, Desa Sialang Kubang, dan Desa lubuk sakit. Kecamatan Perhentian Raja merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Siak Hulu yang dibentuk melalui peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003.

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Perhentian Raja Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu dan Tambang, Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kampar Siak Hulu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan tambang. Kecamatan Perhentian Raja luas wilayahnya menurut pengukuran kantor camat adalah ± 159.67 Km² atau 15.967 Ha. Kecamatan Perhentian Raja merupakan dataran rendah , perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Perhentian Raja sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi sawah, perikanan, hasil hutan, dan hasil galian.

Untuk mendukung kebutuhan perekonomian di masyarakat Pantai Raja, masyarakat menciptakan berbagai macam peluang usaha. Sebagian masyarakat Pantai

Raja bekerja sebagai Petani sebanyak 5.18%, Karyawan Swasta 1.15%, Pengawai Negeri Sipil 0,37%, Buruh Tani 4.49%, dan masih banyak lainnya.

D. PTPN V NUSANTARA

PT Perkebunan Nusantara V yang selanjutnya disebut “Perusahaan”, pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.10 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.

Anggaran Dasar Perusahaan diaktakan oleh Harun Kamil SH., Notaris di Jakarta dengan Akta No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8333.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2014 sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang mengalihkan 90% saham PTPN V dari milik Negara menjadi milik PTPN III. Perubahan struktur saham ini merubah status Perusahaan dari BUMN menjadi Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagai *Champion*.

Perubahan Anggaran dasar terakhir dituangkan dengan Akta No. 12 tanggal 25 Juli 2019 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan. Dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI melalui Surat Nomor: AHU-0056202.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019.

Perusahaan per November 2019 memiliki kebun inti sawit dengan total luas areal tanaman seluas 78.340,09 Ha dengan komposisi TM seluas 57.419,60 ha, TBM seluas 17.540,09 ha, TB/TU/TK seluas 2.736, areal bibitan seluas 127,40 ha dan areal non produktif seluas 517 ha. Perusahaan juga memiliki kebun inti karet dengan total luas areal 8.184 ha dengan komposisi TM seluas 5.215 ha, TBM seluas 2.898 ha, TB/TU/TK seluas 68 ha dan bibitan seluas 3 ha.

Untuk mengolah komoditi kelapa sawit, Perusahaan memiliki 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas olah terpasang sebesar 570 ton TBS per jam dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti sawit. Kemudian untuk mengolah lanjut komoditi inti sawit, Perusahaan memiliki 1 unit Pabrik Palm Kernel Oil dengan kapasitas terpasang sebesar 400 ton inti sawit/hari dengan hasil olahan berupa *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM).

Pengelolaan areal tanaman saat ini memasuki peralihan dari siklus tanaman pertama (Gen-1) menuju siklus tanaman kedua (Gen-2). Siklus pertama dimulai pada era tahun 1980-an melalui proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, IV dan V di Provinsi Riau. Peralihan dari Gen-1 menuju Gen-2 telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan *replanting* areal-areal tanaman usia tua/tua renta yang sudah menurun nilai ekonomis produksinya. Fase peralihan Gen-1

ke Gen-2 ini diperkirakan tuntas pada tahun 2017. Pada saat itulah, seluruh tanaman Perusahaan merupakan tanaman Gen-2 yang diharapkan lebih produktif dibandingkan Gen-1, sebagai buah dari inovasi berlanjut di bidang budidaya tanaman.

Visi dan Misi

Visi

“Menjadi Perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”

Misi

1. Pengelolaan Agro industri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan stakeholder”
2. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan”
3. Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM dan Teknologi 4.0 melalui pengelolaan SDM berdasarkan praktek-praktek terbaik, sistem manajemen SDM serta Teknologi Informasi terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan”

SISTEM TATA NILAI PERUSAHAAN

1. Falsafah “Setiap insan PT PN V meyakini bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas akan bermakna bagi perusahaan, mitra kerja, masyarakat, dan lingkungan, untuk mencapai kinerja unggul”
2. Motto Kita Pekebun Hebat
3. Nilai-Nilai Perusahaan “Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (AKHLAK)
4. Kompetensi Inti Mengelola Kebun Inti, Plasma dan Kemitraan dalam pemenuhan bahan baku untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan dan sesuai harapan pasar



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden Penelitian

Responden Penelitian adalah pihak yang dijadikan Informan atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. *Key Informan* dan *Informan* penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel V.1 : Identitas *Key Informan* dan *Informan*

No	Nama	JK	Umur	Pend.	Pekerjaan
1	M. Rudi, Skss	L	51	S.1	Pimpinan PTPN V Desa Pantai Raja
2	Agus Wiyana. S.Pd.I	L	40	S.1	Camat Perhentian Raja
3	Khairud zaman	L	29	SMA	Kades Pantai Raja
4	Sugandi	L	27	SMA	Forum CSR Kampar
5	Antoni	L	32	SMA	Forum CSR Kampar
6	Adhika	L	33	SMA	Forum CSR Kampar
7	Komarudin, S.E	L	29	S.1	Karyawan Bagian CSR
8	Roni Firmansyah	L	32	SMA	Masyarakat Desa Panta Raja
9	Ade Putra	L	27	SMA	Masyarakat Desa Panta Raja
10	Mashrullah Ahmad	L	38	SLTA	Masyarakat Desa Panta Raja
11	Irwansyahputra	L	45	SLTP	Masyarakat Desa Panta Raja
12	Fauzi Rahman	L	31	S1	Masyarakat Desa Panta Raja

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

B. Hasil Penelian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang ada di Provinsi Riau Khususnya Kabupaten Kampar, dengan membuat progam-progam pemberdayaan masyarakat yang disenergikan dengan progam-progam pemerintah sesuai dengan SKPD masing-masing, namum dalam hal ini yang

melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Berikut Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) menurut kesimpulan diatas di pengaruhi 6 Variabel, Yakni :

1. Standrt Kebijaksanaan Tujuan,
2. Sumber Daya,
3. Karateristik Agen Pelaksana,
4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana,
5. Kondisi Sosial dan
6. Disposisi Sikap Para Pelaksana.

1. Standart Kebijaksanaan dan Tujuan

Standar kebijaksanaan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.

Dalam penelitian ini Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) salah satu yang dianalisis adalah Standart Kebijaksanaan dan Tujuan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Pimpinan Perusahaan PTPN V.

Beliau Menjawab : Tujuan dari CSR PTPN V adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pembangunan di Masyarakat Sekitar yaitu Desa Pantai Raja,

penilaian kinerja progam CSR, berjalan dengan baik, dengan arah sesuai dengan Peraturan yang ada seperti Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Perhentian Raja.

Beliau Menjawab : Tujuan dari CSR PTPN V yaitu untuk meningkatkan desa sekitar dalam pembangunan, dikarenakan Desa Pantai Raja keberadaan Perusahaan tersebut, yang mengakibatkan Desa Pantai Raja Terkena Dampak dari Perusahaan. penilaian kinerja progam CSR, berjalan dengan baik, akan tetapi yang merasakan adalah Masyarakat sekitar yaitu Masyarakat Desa Pantai Raja itu sendiri.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Tujuan dari CSR yang kami dapatkan adalah dalam bentuk sejumlah uang untuk membangun Desa, yang dikarenakan kami segenap Masyarakat Desa Pantai Raja terkena Dampak langsung dari Perusahaan Tersebut. penilaian kinerja progam CSR, berjalan dengan Kurang baik, akan tetapi yang merasakan adalah Masyarakat sekitar yaitu Masyarakat Desa Pantai Raja itu sendiri.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Forum CSR Kampar.

Beliau Menjawab : Tujuan dari CSR yang kami lakukan sudah sesuai dengan keadaan yang terjadi di Desa Pantai Raja dalam Progam sesuai dengan Peraturan Yang ada, penilaian kinerja progam CSR, berjalan dengan baik, dalam melakukan progam sudah dilakukan dengan semestinya dengan memperhatikan keadaan Desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Karyawan Bagian CSR.

Beliau Menjawab : Tujuan dari CSR yang kami lakukan untuk meningkatkan dan membangun desa yang terkena dampak langsung oleh perusahaan seperti Desa Pantai Raja, penilaian kinerja progam CSR, berjalan dengan baik, dalam

menjalan progam sudah dijalankan untuk masyarakat desa yang terkena dampak oleh perusahaan CSR.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Tujuan dari CSR yang kami dapatkan adalah dalam bentuk pembangunan yang kami masyarakat Desa Pantai Raja rasakan dalam adanya perusahaan PTPN V, penilaian kinerja progam CSR, berjalan dengan Kurang baik, kami masyarakat menilai progam tersebut berjalan dengan memperhatikan lingkungan yang terkena pencemaran limban dan jalanan berlubang.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Standart Kebijaksanaan dan tujuan progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pelaksanaan Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V Di Desa Pantai Raja sudah berjalan sesuai dengan progam, tetapi dalam observasi yang penulis lakukan belum semuanya progam yang berjalan, mengakibatkan pembangunan mengganggu masyarakat sekitar.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Standart Kebijaksanaan dan Tujuan progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam menjalankan Kebijakan Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah berjalan, tetapi menurut

masyarakat Desa Pantai Raja belum Maximal dalam menjalankan Progamnya, karena masih adanya pembangunan yang masih belum diselesaikan.

Berdasarkan Hasil Observasi dan Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Standart Kebijakan dan Tujuan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V Di Desa Pantai Raja sudah berjalan sesuai dengan program, tetapi dalam observasi yang penulis lakukan belum semuanya program yang berjalan, mengakibatkan pembangunan mengganggu masyarakat sekitar dan Dalam menjalankan Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah berjalan, tetapi menurut masyarakat Desa Pantai Raja belum Maximal dalam menjalankan Progamnya, karena masih adanya pembangunan yang masih belum diselesaikan. Masuk dalam kategori **Kurang Terlaksana**

2. Sumber Daya

Sumber daya: kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

Dalam penelitian ini Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) salah satu yang dianalisis adalah Sumber Daya.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Pimpinan Perusahaan PTPN V.

Beliau Menjawab : Sumber daya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan peraturan yang ada bersifat untuk membangun Masyarakat Sekitar dengan cara memberi dana keuangan untuk membangun yang masyarakat sekitar butuhkan atau terkena dampak dari Perusahaan PTPN V, ada juga jika yang mengajukan proposal untuk keperluan yang sesuai dengan peraturan dan pemerintah setempat

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Perhentian Raja.

Beliau Menjawab : sumber daya di berikan langsung ke masyarakat untuk kepentingan bersama dalam bentukj membangun desa, dikarenakan terkena dampak dari perusahaan PTPN V.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Sumber Daya diberikan langsung oleh Perusahaan guna untuk meningkatkan Desa, dikarenakan PTPN V berada di Desa Pantai Raja, untuk itu perusahaan harus mengerti dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Forum CSR Kampar.

Beliau Menjawab : Sumber Daya didapatkan memang sudah seharusnya oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat mempunyai tujuan dalam pembangunan desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Karyawan Bagian CSR.

Beliau Menjawab : Sumber daya diberikan kepada masyarakat sudah ada di alokasikan untuk masyarakat Desa Pantai Raja yang langsung kena dampak dari perusahaan PTPN V.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Sumber Daya yang di berikan oleh PTPN V di gunakan untuk membangun desa Pantai Raja yang terkena dampak dari perusahaan tersebut seperti Pencemaran lingkungan dan jalanan berlubang.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Sumber Daya Pelaksanaan Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak pernah transparasi dalam pemberian kepada Desa Pantai Raja, sehingga masyarakat Desa Pantai Raja hanya mengetahui dalam bentuk pembangunan yang dilakukan oleh PTPN V.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Sumber Daya di keluarkan oleh perusahaan PTPN V kepada masyarakat Desa Pantai Raja, dalam bentuk pembangunan desa di karenakan desa tersebut terkena dampak langsung oleh Perusahaan.

Berdasarkan Hasil Observasi Dan Wawancara Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Sumber Daya Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan tidak pernah transparansi dalam pemberian kepada Desa Pantai Raja, sehingga masyarakat Desa Pantai Raja hanya mengetahui dalam bentuk pembangunan yang dilakukan oleh PTPN V, perusahaan PTPN V kepada masyarakat Desa Pantai Raja, dalam bentuk pembangunan desa di karenakan desa tersebut terkena dampak langsung oleh Perusahaan. Masuk dalam kategori **Cukup Terlaksana**

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Dalam penelitian ini Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) salah satu yang dianalisis adalah Karakteristik Agen Pelaksana.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Pimpinan Perusahaan PTPN V.

Beliau Menjawab : Karakteristik Agen Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah, pemberian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah menjadi hal yang penting di Perusahaan dan perusahaan mempunyai prosedur dalam pelaksanaan program tersebut dan wilayah tertentu yang mendapatkannya.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Perhentian Raja.

Beliau Menjawab : Karakteristik Agen Pelaksana Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perusahaan membantu dalam bentuk pembangunan Desa Pantai Raja Dan wilayah sekitaran perusahaan tersebut.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Karakteristik Agen Pelaksana progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perusahaan PTPN V berada di Desa Pantai raja yang menjadikan desa Pantai Raja mendapatkan hak dari Perusahaan dalam bentuk pembangunan dengan wilayah tertentu karena Desa Pantai Raja yang terkena dampak langsung oleh perusahaan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Forum CSR Kampar.

Beliau Menjawab : Karakteristik Agen Pelaksana Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dlam menjalankan progam tersebut perusahaan mempunya tata cara dalam pelaksanaan progam, dan wilayah yang mendapatkan sudah ditentukan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Karyawan Bagian CSR.

Beliau Menjawab : Karakteristik Agen Pelaksana Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Mempunyai racangan dalam menjalankan progam tersebut dan wilayah yang mendapatkan progam dari perusahaan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Karakteristik Agen Pelaksana Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kami masyarakat Desa Pantai Raja mendapatkan Progam dari perusahaan dikarenakan kami masyarakat yang terkenda dampak langsung oleh

perusahaan, program yang diberikan dalam bentuk untuk pembangunan Desa kami.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Karakteristik Agen Pelaksana Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dalam pembangunan yang dilakukan Perusahaan dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, mengikuti aturan yang ada dalam pemberian CSR ke desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana dari Program CSR PTPN V adalah pemberian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, mempunyai prosedur dalam pelaksanaan program tersebut dan wilayah tertentu yang mendapatkannya, untuk itu perusahaan harus mengerti dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat Desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Observasi dan Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana, dalam pembangunan yang dilakukan Perusahaan dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, mengikuti aturan yang ada dalam pemberian CSR ke desa Pantai Raja dan Program CSR PTPN V adalah pemberian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, mempunyai

prosedur dalam pelaksanaan program tersebut dan wilayah tertentu yang mendapatkannya, untuk itu perusahaan harus mengerti dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat Desa Pantai Raja. Masuk dalam kategori **Kurang Terlaksana**

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana: implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.

Dalam penelitian ini Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) salah satu yang dianalisis adalah Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Pimpinan Perusahaan PTPN V.

Beliau Menjawab : Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana Program tanggung Jawab Sosial Perusahaan itu perlu dalam bentuk membangun Desa Pantai Raja, sehingga Perusahaan Mengetahui membutuhkan bangunan yang bisa di gunakan oleh banyak masyarakat Desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Perhentian Raja.

Beliau Menjawab : Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kurangnya komunikasi dan terkoordinasi dengan program pemerintah dalam membangun Desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana Progam Tanggung jawab Sosial Perusahaan sering terjadi keterkaitan dengan kebutuhan Desa Pantai raja dengan Progam Perusahaan PTPN V dalam pembangunan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Forum CSR Kamar.

Beliau Menjawab : Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berkumikasi berguna dalam bentuk membangun Desa Pantai Raja, agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Karyawan Bagian CSR.

Beliau Menjawab : Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, kami mensurvey Desa Pantai raja untuk mengetahui bangunan apa yang dibutuhkan Desa Pantai raja, dalam pelaksanaan Progam perusahaan PTPN V.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan . kami mendapatkan Progam perusahaan PTPN V dalam pembangunan kurang koordinasi dan komunikasi dalam pembanguann yang dijalankan oleh PTPN V.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kamar. Berdasarkan Indikator Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksanaan Progam Tanggung Jawab Sosial Kurangnya Komunikasi dari Perusahaan PTPN V dalam menjalankan Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, mengakibatkan pelaksaan progam tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan P Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan hanya berkomunikasi dengan forum CSR untuk Mengetahui bangunan yang bisa di gunakan oleh banyak masyarakat Desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Observasi dan Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan P Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kurangnya Komunikasi dari Perusahaan PTPN V dalam menjalankan Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, mengakibatkan pelaksanaan progam tidak berjalan dengan baik dan Perusahaan hanya berkomunikasi dengan forum CSR untuk Mengetahui bangunan yang bisa di gunakan oleh banyak masyarakat Desa Pantai Raja masuk dalam kategori **Cukup Terlaksana**

5. Kondisi Sosial

Kondisi sosial, ekonomi dan politik: pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

Dalam penelitian ini Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) salah satu yang dianalisis adalah Kondisi Sosial.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Pimpinan Perusahaan PTPN V.

Beliau Menjawab : Kondisi Sosial Perusahaan adalah Sikap memberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar guna untuk pembangunan Desa yang lebih Maju.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Perhentian Raja.

Beliau Menjawab : Kondisi Sosial Perusahaan adalah Sikap memberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar yang diketahui oleh pemerintah daerah untuk mengetahui dalam bentuk pembangunan desa

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Kondisi Sosial Perusahaan adalah Sikap memberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar. Menjadikan desa Pantai mendapatkan apa yang seharusnya dikarenakan dekat dengan Perusahaan yang terkenda dampak pencemaran lingkungan dan jalanan berlumbang.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Forum CSR Kampar.

Beliau Menjawab : Kondisi Sosial Perusahaan adalah Sikap memberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar, guna untuk meningkatkan pembangunan Desa Pantai Rajas

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Karyawan Bagian CSR.

Beliau Menjawab : Kondisi Sosial Perusahaan adalah Sikap memberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar, memberikan Program adalah tugas perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Kondisi Sosial Perusahaan adalah Sikap memberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar pembangunan, kami masyarakat bersyukur dengan adanya pembangunan yang berikan oleh Perusahaan PTPN V, tetapi pembangunan yang dilakukan tidak setara dengan dampak yang d berikan perusahaan kepada masyarakat Desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Kondisi Sosial Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Sikap Tanggung Jawab Perusahaan dalam menjalankan program-program yang belum terselesaikann yang mengakibatkan Masyarakat terganggu melakukan aktifitasnya.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Kondisi Sosial Perusahaan dari Program CSR PTPN V adalah Sikap memberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar guna untuk pembangunan Desa yang lebih Maju dan bisa di pergunakan.

Berdasarkan Hasil Observasi dan Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Kondisi Sosial Perusahaan dari Program CSR PTPN V, Sikap memberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar guna untuk pembangunan Desa yang lebih Maju dan bisa di pergunakan dan Sikap memberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar guna untuk pembangunan Desa yang lebih Maju dan bisa di pergunakan. Masuk dalam kategori **Cukup Terlaksana**

6. Disposisi Sikap Para Pelaksana

Disposisi sikap para pelaksana: persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Dalam penelitian ini Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) salah satu yang dianalisis adalah Disposisi Sikap Para Pelaksana.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Pimpinan Perusahaan PTPN V.

Beliau Menjawab : Disposisi Sikap Para Pelaksana Program tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dalam membangun Desa Pantai Raja sesuai dengan peraturan yang berlaku guna membangun desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Perhentian Raja.

Beliau Menjawab : Disposisi Sikap Para Pelaksana Progam tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan progam pemerintah dalam pembangunan Desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Disposisi Sikap Para Pelaksana Progam tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sesuai dengan anjuran pemerintah dalam pembangunan Desa Pantai Raja, terjadi keterlambatan dalam pembanguan yang dilakukan oleh Perusahaan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Forum CSR Kampar.

Beliau Menjawab : Disposisi Sikap Para Pelaksana Progam tanggung Jawab Sosial Perusahaan, membangun desa sekitar PTPN V adalah Desa Pantai Raja.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Karyawan Bagian CSR.

Beliau Menjawab : Disposisi Sikap Para Pelaksana Progam tanggung Jawab Sosial Perusahaan membangun Desa sesuai dengan peraturan yang ada .

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat Desa Pantai Raja.

Beliau Menjawab : Disposisi Sikap Para Pelaksana Progam tanggung Jawab Sosial Perusahaan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memajukan desa Pantai Raja, tetapi keterlambatan dalam membangun, sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja

Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Disposisi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab dalam bentuk pembangunan yang sudah dilakukan, tetapi masih ada yang belum selesai sesuai dengan program agar masyarakat tidak terganggu dalam melakukan aktifitas, sehingga masyarakat.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Disposisi adalah membangun Desa Pantai Raja sesuai dengan peraturan yang berlaku guna membangun desa Pantai Raja kepada masyarakat sekitar, guna untuk pembangunan Desa yang lebih Maju dan bisa di pergunakan.

Berdasarkan Hasil Observasi Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Disposisi pembangunan yang sudah dilakukan, tetapi masih ada yang belum selesai sesuai dengan program agar masyarakat tidak terganggu dalam melakukan aktifitas, sehingga masyarakat, membangun Desa Pantai Raja sesuai dengan peraturan yang berlaku guna membangun desa Pantai Raja kepada masyarakat sekitar, guna untuk pembangunan Desa yang lebih Maju dan bisa di pergunakan. Masuk dalam kategori **Kurang Terlaksana**

C. Hambatan-Hambatan dan Upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar)

Dari hasil wawancara dan analisis penulis, maka di dapatkan hambatan yang dihadapi pihak pemerintah dan perusahaan sebagai pelaksanaan program CSR antara lain sebagai berikut :

1. Masih Kurang adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Forum TJSP, Perusahaan dan Masyarakat, dalam pelaksanaan program CSR perusahaan PTPN V komunikasi yang dilakukan dalam menjalankan program perbaikan jalan masih belum terselesaikan, dimna dalam komunikasi yang dilakukan di dalam forum CSR, belum tersampaikan, sehingga masih adanya jalanan berlubang di Desa Pantai Raja sampai saat ini.
2. Masih belum berjalan adanya koordinasi dengan masyarakat terhadap Forum CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, perusahaan dalam melakukan program perbaikan jalan, tidak mengabaikan yang menjadikan jalanan desa pantai raja berlubang, sehingga mengganggu masyarakat Desa pantai raja dalam melakukan aktifitas.
3. Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan program-program pemerintah dengan program-program perusahaan. Pihak pemerintah kurang tegas kepada pihak

perusahaan, yang menjadikan perusahaan PTPN V, tidak memperdulikan keadaan jalan di Desa Pantai Raja, yang membuat masyarakat Desa Pantai Raja terganggu.

4. Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial perusahaan sehingga masih adanya pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat yang tidak tau pasti tentang jenis dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat dalam pengajuan Proposal Kepihak perusahaan hanya sampai ke Security, belum tentu di sampaikan kepada pihak perusahaan PTPN V yang mengakibatkan dalam Peraturan di indahkan yang menjadikan masyarakat tidak pernah dapat dalam mengajukan proposal. Pihak dari pemerintah dalam melakukan pengajuan hanya di beri tidak sepenuhnya di beri oleh pihak perusahaan, pihak perusahaan hanya membantu kepada pihak pemerintah Desa.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar). Dikategorikan **Kurang Terlaksana** berikut uraian Kesimpulan berdasarkan Indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator Standart Kebijaksanaan dan Tujuan dalam penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar). Yakni pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai **Kurang Terlaksana** Karena Perusahaan dalam menjalankan Ptogam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum semuanya berjalan, sehingga membuat masyarakat Desa Pantai Raja terganggu melakukan aktifitas.
2. Sumber Daya dalam penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) Yakni pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai **Cukup Terlaksana** karena dalam pemberian dana tidak tranparansi dalam pemberian dan pembangunan untuk Desa Pantai Raja.
3. Karateristik Agen Pelaksanaan dalam penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) Yakni pelaksanaan Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan dinilai **Kurang Terlaksana** Pelaksanaan Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menunggu Desa yang terkena Dampak mengadu, sebelum dilakukan Pembangunan

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana dalam penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) Yakni pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai **Kurang Terlaksana** Kujrangnya Koordinasi dan Komunikasi Pihak Persusahaan dengan Masyarakat mapun Pemerintah Daerah.
5. Kondisi Sosial dalam penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) Yakni pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai **Cukup Terlaksana** karena dalam pelaksanaan Progam Tanggung Jawab Perusahaan Tidak memperhatikan Desa Pantai Raja yang terkena dampak langsung perusahaan.
6. Disposisi Sikap Para Pelaksana dalam penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN V (Studi Kasus Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar) Yakni pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai **Kurang Terlaksana** karena Tanggung Jawab perusahaan yang dilakukan perusahaan terlambat dalam pembangunan yang dilakukan.

7. Faktor Penghambat Masih belum berjalan adanya koordinas dengan masyarakat terhadap Forum CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan progam-program pemerintah dengan progam-program perusahaan, Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial perusahaan sehingga masih adanya pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat yang tidak tau pasti tentang jenis dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Masih belum adanya peraturan Kabupaten tentang tata cara pencairan dan dan pelaksanaan TJSP, Belum adanya peraturan Bupati Kampar yang menindaklanjuti peraturan daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 Tentang TJSP

B. Saran

1. Harus adanya perbaikan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh adanya koordinasi dengan masyarakat terhadap Forum CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
2. Perlu bersosialisasi Forum CSR terhadap Masyarakat Desa Pantai Raja dalam menjalankan Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
3. Adanya Perbaikan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk progam-program pemerintah dengan progam-program perusahaan.

4. Pemerintah Daerah harus bersosialisasi Tentang Perda No.3 Tahun 2012

Tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Affiddin 2010. Pengantar administrasi Pembangunan, Bandung : Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Crowther, David. 2008 *Corporate Social Responsibility*. Gulen Aras & Ventus. Publishing Aps. Cutlip, Scoot M, Allen Center
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Edi Suharto. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Hadari Nawawi, 1994, “Penelitian Terapan”, Yogyakarta: Gajahmada University.
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Handyaningrat Soewarno. 1984. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung
- Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Kasim, Azhar. 1994. Pengukuran efektivitas dalam organisasi, Jakarta: PAU
- Keban, Yeremias, T, 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi. Publik, Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga), Yogyakarta: Gava Media.
- Kristiadi, J.R. 1994. Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Kristiadi, J.R. 1994. Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Rahardjo. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha ilmu
- Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih. Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Tim Penyusun, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*, Badan Penerbit FISIPOL Pekanbaru : UIR.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi)*. Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

B. JURNAL:

- G.R Terry. 2010: 16. *The Management Of Human Resource Development Based On The Action, Planning, Organizing, And Controlling*. *Jurnal Manajemen*, 10(2), pp. 129-142.
- Made Devi Wedayanti. 2017. *implementasi peraturan daerah provinsi riau nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di provinsi riau (studi pemberdayaan masyarakat di sekitar pt. tamora agro lestari desa serosah kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi)*. *PUBLIKA*, Vol 3, No. 1 Hal. 154-167 (2017)

Made Devi Wedayanti, Achmad Nurmandi, Hasse Jubba. 2021. Efektivitas pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. jurnal El-Riyasah, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021

Yuniarti Wahyuningrum, Irwan Noor, dan Abdul Wachid, 2014. Pengaruh Program *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penigkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi Csr Pt. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan). Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Vol.1 No.5, Hal 109-115

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang undang-undang perseroan terbatas

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Tanggung Jawab Sosial

Peraturan daerah Kabupaten Kampar No 3 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

